

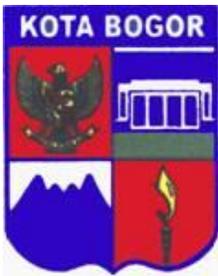


**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD)**

**2024**

**PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**

Jl. Kapten Muslihat No. 21, RT. 001/RW. 001, Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor 16122  
Tlp. (0251) 8338052, website:[www.bappeda.kotabogor.go.id](http://www.bappeda.kotabogor.go.id)

 <p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR</b> <b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH</b> <b>BIDANG PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH (P2EPD)</b></p>	Nomor SOP	: SOP/P2EPD.1/013
	Lintas Fungsi Peta Proses Bisnis	: Melaksanakan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
	Aktifitas Lintas Fungsi	: Melaksanakan Penyusunan RKPD
	Tgl. Pembuatan	: 03 Januari 2024
	Tgl. Revisi	:
	Tgl. Efektif	: 03 Januari 2024
Disahkan oleh	: <div style="text-align: right;"> <p>Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kota Bogor</p>  <p><b>M. M. M. M. M.</b> NIP. 197707062006041018</p> </div>	
Judul SOP	: <b>SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD)</b>	
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</li> <li>4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah</li> <li>5. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor</li> <li>6. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami Tugas Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor</li> <li>2. Memahami Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor</li> <li>3. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Materi Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>4. Memahami Teknologi Informasi dan Komunikasi ( TIK )</li> </ul>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN/ PERLENGKAPAN</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Penanganan Surat Masuk</li> <li>2. SOP Penanganan Surat Keluar</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer/ Laptop</li> <li>2. Printer</li> <li>3. Internet</li> <li>4. ATK</li> </ul>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Jika prosedur tidak dilaksanakan dengan baik maka dapat berakibat tidak tersedianya data perencanaan pada sistem informasi pemerintah daerah sehingga berakibat tidak tersedia dan terbukanya informasi secara cepat bagi pemangku kepentingan yang membutuhkan		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. SK Tim Pengelola Data SIPD</li> <li>2. Berita Acara Kebutuhan Data Daerah</li> <li>3. Berita Acara Data Daerah Terinput dalam Aplikasi SIPD</li> </ul>

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Bappeda	Kepala Bidang	Fungsional Perencana	Tim pengelolaan	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima SK Walikota terkait Tim pengelolaan data sesuai kebutuhan daerah dan mendisposisi untuk ditindaklanjuti					SK Tim Pengelola Data SIPD	15 menit	Disposisi	
2	Memerintahkan identifikasi kebutuhan data sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan daerah.					Disposisi	15 menit	Perintah identifikasi kebutuhan data daerah	
3	Mengusulkan kebutuhan pengumpulan data di tahun berjalan dalam berita acara					Perintah identifikasi kebutuhan data daerah	30 menit	Draft Berita Acara	
4	Memeriksa usulan kebutuhan pengumpulan data di tahun berjalan dalam berita acara					Draft Berita Acara	15 menit	Draft Berita Acara	
5	Menyetujui usulan kebutuhan pengumpulan data di tahun berjalan dalam berita acara					Draft Berita Acara	15 menit	Berita Acara	
6	Mengumpulkan data sesuai berita acara yang telah ditetapkan					Berita Acara	300 menit	Data terkumpul	
7	Melakukan pengisian data dalam SIPD dengan memperhatikan perencanaan waktu pengisian data dalam berita acara					Data terkumpul	300 menit	Data terinput dalam Aplikasi SIPD	
8	Memeriksa data untuk melihat kesesuaiannya dengan prinsip satu data Indonesia dan mencatat dalam berita acara					Data terinput dalam Aplikasi SIPD	60 menit	Data sesuai	
9	Memeriksa hasil pemeriksaan kesesuaian data dalam berita acara					Draft Berita Acara	30 menit	Draft Berita Acara	
10	Menandatangani hasil pemeriksaan kesesuaian data dalam berita acara					Draft Berita Acara	15 menit	Berita Acara	